

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Mutual legal Assistance* (MLA) merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta *Mutual legal Assistance* memiliki kedudukan yang penting dalam rangka pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi, hal ini dapat dilakukan dalam bentuk sharing profit asset. Akan tetapi ada kelemahan dalam MLA ini yaitu walaupun perjanjian MLA sudah ditandatangani, negara yang diminta tersebut masih dapat melakukan penolakan dengan alasan bahwa dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Selain itu *Mutual Legal Assistance* (MLA) memiliki peran dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu :
 - a. Sebagai sarana pemberian faktor *deterrence* yang menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi koruptor untuk menempatkan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
 - b. Memberikan kapasitas dalam pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi

- c. Untuk meningkatkan kerja sama negara-negara berkembang yang bertujuan membantu mengurangi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di negara lain.
2. Model pengembalian aset secara *civil forfeiture* merupakan model yang signifikan untuk diterapkan di Indonesia dimana *civil forfeiture* menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat begitu diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana, selain itu *civil forfeiture* bukan merupakan gugatan kepada tersangka atau terdakwa, melainkan kepada aset sehingga aset negara dapat diselamatkan meski pelaku tindak pidana korupsi telah melarikan diri atau meninggal dunia.

Unsur mendasar dari tindak pidana korupsi adalah menimbulkan kerugian keuangan negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya memberikan pidana penjara bagi pelaku tetapi juga keharusan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Salah satu upaya untuk mencegah, melindungi dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi adalah melalui lembaga pemidanaan dalam bentuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Penggunaan instrumen perdata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah dianut oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diberlakukan di Indonesia saat ini yaitu Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 38C Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

Dalam teori pengembalian aset disebutkan bahwa sistem hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan.

B. Saran

1. Masalah aset tindak pidana menjadi persoalan hukum pidana tersendiri karena menjadi persoalan yang mendasar dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana. Akan lebih lengkap apabila pengaturan perampasan aset tindak pidana dihubungkan dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rencana perubahan ketentuan umum hukum pidana materiil (RUU KUHP) dan ketentuan umum hukum acara pidana (Draf RUU KUHP) karena keduanya merupakan dasar pengaturan (pembangunan) sistem hukum pidana nasional Indonesia. Dan juga memberikan kepastian hukum dalam kedudukan pihak ketiga yang terkait pada aset tindak pidana korupsi, sehingga kedudukan pihak ketiga mendapat jaminan kepastian hukum atas hak dan kewajibannya serta perlindungan atas kesewenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme perampasan aset secara pidana maupun secara non-pidana (*in rem*).
2. Dengan meratifikasi UNCAC, maka sistem hukum positif Indonesia harus melakukan perubahan ataupun pembaharuan agar ditujukan terjadi keselarasan dalam mekanisme perampasan aset yang ada secara

yurisdiksi nasional maupun antar yurisdiksi (Internasional), sehingga tidak terjadi persepsi dan pengertian yang berbeda sehingga menimbulkan kegagalan dalam penerapan pengembalian aset (*recovery asset*) khususnya aset yang telah dialihkan pada pihak ketiga. Dan menciptakan aparatur aparaturnya penegak hukum yang lebih profesional agar sesuai dengan standar internasional dalam hal melakukan ketentuan tindakan perampasan aset sehingga tidak menimbulkan kesewenangan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada sipelaku tindak pidana maupun pada pihak ketiga yang terkait.



12